



RENCANA KERJA TAHUN 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BALANGAN



BerAKHLAK #bangga
#melayani
#bangsa

Jln. Jend. A. Yani Km. 2,5 Paringin Selatan 71618
Telp/Fax : (0526)2028432

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat diselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2024. Rencana Kerja ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh setiap SKPD sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan merupakan bagian dari tahapan upaya pencapaian Rencana Kerja yang tertuang dalam Penyesuaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dijabarkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta memudahkan dalam melakukan evaluasi kinerja SKPD.

Semoga penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2024 dapat bermanfaat dan dapat mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Balangan.

Paringin, Juli 2023

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Balangan



H. SYAIFUDDIN TAILAH, S.Pd,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670403 199403 1 015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2024 disusun mengacu pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Balangan untuk periode tahun 2024. Perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2024 dirumuskan dengan menelaah hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 dan mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Rencana Kerja ini sangat penting bagi SKPD sebagai dasar untuk penyusunan anggaran dan kegiatan pada tahun 2024 sebagai proses tahapan penyusunan rancangan APBD Kabupaten Balangan Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 -2026
15. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
16. Peraturan Bupati Balangan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan
17. Peraturan Bupati Balangan Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai media evaluasi pelaksanaan program/kegiatan, merumuskan rencana kerja untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Tahun 2024 ini adalah untuk memudahkan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan agar dalam kinerjanya tidak lepas dari indikator dan target yang sudah ditentukan, agar setiap pejabat dan pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dapat dicapai secara optimal.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2024

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2022 yang didasarkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026, untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam rangka memenuhi target sasaran RPJMD arah kebijakan yang dilaksanakan adalah peningkatan kualitas data dan informasi serta memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah melalui program pengembangan data informasi/statistik daerah dan program perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas. Adanya data/informasi, menjadikan perencanaan yang dibuat menjadi terukur. Untuk mewujudkan peningkatan kinerja pembangunan daerah dilaksanakan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang baik yang senantiasa dipantau dan dikendalikan pelaksanaannya, diharapkan apa yang telah direncanakan dapat diwujudkan, dan target-target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor050-5559 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, urusan pemerintahan umum terdapat pada bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan program sebagai berikut:

- a. 8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- b. 8.01.03 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
- c. 8.01,04 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. 8.01.05 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;dan
- e. 8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Dari sisi penyerapan anggaran, serapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sangat baik, yaitu sebesar Rp. 7.330.210.844,- atau sebesar 94.70% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp. 7.740.206.950,-. Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini berasal dari:

- a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 7.120.074.844,- yang terdiri dari :
 - 1). Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 2,396.178.319,-dibandingkan anggaran sebesar Rp 2,658.094.350,- atau terealisasi. sebesar 90.15%
 - 2). Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 2.539.946.525,- dibandingkan anggaran sebesar Rp 2.679.462.600,- atau terealisasi sebesar 994.79%
 - 3). Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp 2.183.950.000,- dibandingkan anggaran sebesar Rp 2.183.950.000,- atau terealisasi sebesar 100%
- b. Realisasi Belanja Modal
Belanja modal di tahun 2022 ini sebesar Rp 156.586.000,- dibandingkan anggaran sebesar Rp 158.700.000,-

Sedangkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)*

Kabupaten Balangan

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
							Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun berjalan '(2022)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
															K	Rp			
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	67,5	Nilai	62,56	nilai	64.5	nilai	67,93	%	105	92,89	65,20	nilai	70	Nilai	110.00	65	
5	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100	%	100	%	100	%	100	%	100	98,51	100	%	100	%	100.00	62.68
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	13	dok	3	dok	2	dok	2	dok	100	99,08	2	dok	7	dok	60.00	49
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											2	dok	2	dok	50.00	50
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD											2	dok	2	dok	50.00	50

5	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	laporan	2	dok	2	dok	2	dok	100	95,98	2	laporan	2	laporan	50.00	40,59
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100	%	100	%	100	%	100	%	100	90,38	100	%	100	%	50.00	58,37
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	90,15	17	orang	17	orang	50.00	58,78
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan keuangan akhir tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	1	laporan	100	%	100.00	100,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase laporan keuangan Semesteran (laporan)	100	laporan	100	laporan	100	%	100	%	100	99,71	18	laporan	18	laporan	50.00	40,43
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	98,85	100	%	100	%	100.00	96,63
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Beserta Perlengkapannya (stell)	178	stell	17	stell	17	stell	98	stell	100	97,02	2	paket	2	paket	100.00	96,13
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51	op	10	op	2	org	10	orang	100	99,71	10	org	10	org	100.00	96,69
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	99,53	100	%	50	%	50.00	62,35
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	72	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	99,96	1	paket	1	paket	50.00	46,59
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah komputer dan perlengkapan komputer yang diadakan, Jumlah Perlengkapan kantor yang diadakan (paket)	10	paket	1	paket	1	paket	5	paket	100	98,66	10	paket	10	paket	0.00	41,36

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk pegawai kesbangpol Kab. Balangan (bulan)	72	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	99,93	1	paket	1	paket	50.00	42,28
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	95,45	1	dok	1	dok	50.00	47,48
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	%	100	%	100	%	100	%	100	99,98	620	laporan	620	laporan	60.00	66
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diadakan	100	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang diadakan (buah)	4	buah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72	Bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	98,02	12	laporan	12	laporan	60.00	51,90
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan jasa surat menyurat (bulan)	72	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	98,34	12	laporan	12	laporan	60.00	50,65
		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air & listrik	Jumlah waktu terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	95,97	12	laporan	12	laporan	60.00	47,92
		Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah waktu terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	bulan	12	bulan	12.00	bulan	12	bulan	100	100	12.00	laporan	12.00	laporan	60.00	50,00
		Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	72	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	99,39	12	laporan	12	laporan	60.00	48,56

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	97,75	12	bulan	6	bulan	50.00	48,95
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas dan Operasional Layak Fungsi	72	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	97,86	24	unit	24	unit	50.00	52,62
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Gedung kantor layak fungsi	72	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	97,59	2	unit	2	unit	50.00	42,28
			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakat	100	%	100	%	100	%	100	%	100	99,67	100	%	100	%	50.00	41,49
			<i>Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</i>		6	dok	1	keg	1	dok	1	dok	100	99,67	1	dok	0	dok	50.00	41,49
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggalika dan Sejarah kebangsaan	Jumlah koordinasi gugus tugas GNRM yang dilaksanakan dan Jumlah fasilitasi pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan	6	keg	1	keg	1	keg	1	keg	100	99,67	58	orang (unsur)	0	keg	50.00	41,49
		11			keg	1	keg	2	keg	2	keg	100	100	3	laporan	0	keg	50.00	45,64	
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mengikuti Seminar Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan kebangsaan	5	keg	1	keg	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	50.00	45
			PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Parpol yang aktif	100	%	82	%	100.00	%	100	%	100.00	98,86	100.00	%	91.00	%	91.00	6,82

			Perumusan Kebijakan Teknis dan pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik	Dokumen Perumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi , Fasilitas Kelembagaan Pemerintah Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6	Dok	1	dok	1	dok	1	dok	100	98,86	1	dok	1	dok	48.00	37,82
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Pendidikan Politik oleh parpol dan Jumlah pembinaan Etika Budaya Politik bagi Parpol	6	parpol	1	lap	2	keg	2	keg	100	96,53	2664	orang	2,664	orang	50.00	44,34
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah kegiatan Diskusi Politik dalam merumuskan kebijakan , Jumlah pembinaan/pengawasan bantuan dana parpol , Jumlah koordinasi pelaksanaan pemilu	4	parpol	1	lap	1	keg	1	keg	100	98,02	214	orang	214	orang	50.00	43,53
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/PemilihanUmum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil verifikasi bantuan parpol	3	parpol	9	parpol	9	laporan	9	laporan	100	99,15	9	laporan	9	laporan	100.00	35,43
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	Persentase Ormas yang aktif	100	%	100	%	100	%	100	%	100	84,32	100	%	30	%	50.00	45,89
			Perumusan kebijakan Teknis dan Pematapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	6	dok	1	dok	1	dok	1	dok	100	84,32	1	dok	0	dok	50.00	45,89

		Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah ormas yang direkomendasikan untuk mendapatkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	100	ormas	100	ormas	100	%	100	%	100	97,89	468	orang	468	orang	50.00	44,55
		Pelaksanaan monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Ormas yang dibina melalui monev	30	ormas	5	ormas	5	ormas	5	ormas	100	67,58	3	laporan	3	laporan	50.00	45,77
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Ormas Keagamaan yang Aktif	100	%	100	%	100	%	100	%	100	96,28	100	%	50	%	50.00	46,28
		<i>Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	6	Org	1	dok	1	dok	1	dok	100	96,28	1	dok	0	dok	50.00	46,28
		Pelaksanaan koordinasi di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah fasilitasi pelaksanaan P4GN (koordinasi dan atau pembinaan)	6	%	1	keg	1	keg	1	keg	100	95,77	35	orang (unsur)	35	orang (unsur)	50.00	48,54
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan FKUB	6	Etnis	1	keg	1	keg	1	keg	100	98,28	1	laporan	1	laporan	50.00	49,50
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	100	%	100	%	100	%	100	%	100	91,88	100	%	100	%	100.00	28,21
		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	6	dok	0	dok	1	dok	1	dok	100	91,88	1	dok	1	dok	50.00	49

			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Jumlah Daerah Rawan Potensi konflik yang terawasi ; Jumlah Fasilitasi FKDM	100	%	100	%	100	%	100	%	100	92,66	1	dok	1	dok	100.00	40,14
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Jumlah Daerah Rawan Potensi konflik yang terawasi ; Jumlah Fasilitasi FKDM	24	keg	4	krgr	4	keg	4	keg	100		32	orang (unsur)	32	orang (unsur)	50.00	47
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	24	Keg	4	keg	4	keg	4	keg	100	94,52	200	orang (unsur)	200	orang (unsur)	50.00	45
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah koordinasi deteksi dini konflik sosial	24	keg	4	kegiatan	4	keg/rapat	4	kegiatan	100	93,14	4	laporan	4	laporan	43.00	45,40
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Forkopimda	20	Keg	0	kali	7	kegiatan	7	Kegiatan	100	74,41	1	dokumen	1	dokumen	50.00	45

Dari 6 (enam) Program yang dipangku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan yang terdiri dari 5 (lima) Program pada bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik ditambah 1(satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan 11 Kegiatan serta 31 Sub Kegiatan, semua Program tercapai kinerjanya 100% dan 1 Program yang tercapai melebihi 100% yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang capaian kinerjanya 105%

Adapun rincian capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	Aggaran	Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	105%	3,886,165,350	3,610,034,247	92.89
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	89,030,900	87,705,600	98.51
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	72,605,000	71,939,700	99.08
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	16,425,900	15,765,900	95.98
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,724,765,250	2,462,657,019	90.38
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	2,658,094,350	2,396,178,319	90.15
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	1,162,000	1,162,000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100%	65,508,900	65,316,700	99.71
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	125,620,000	124,173,810	98.85
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	98%	40,260,000	39,060,000	97.02
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	85,360,000	85,113,810	99.71
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	535,237,900	532,738,650	99.53
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	9,470,000	9,466,500	99.96
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	170,771,000	168,483,000	98.66
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	10,354,900	10,347,150	99.93
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	2,640,000	2,520,000	95.45
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	342,002,000	341,922,000	99.98
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	187,802,300	184,078,006	98.02
Penyediaan jasa surat menyurat	100%	39,700,000	39,040,000	98.34

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air & listrik	100%	65,412,000	62,772,898	95.97
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	100%	12,550,000	12,550,000	100
Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	100%	70,140,300	69,715,108	99.39
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	223,709,000	218,681,162	97.75
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	135,949,000	133,036,162	97.86
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	87,760,000	85,645,000	97.59
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	100%	1,581,630,000	1,576,380,800	99.67
Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100%	1,581,630,000	1,576,380,800	99.67
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	100%	1,581,630,000	1,576,380,800	99.08
	100%			
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	100%	920,840,000	910,367,600	98.86
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik	100%	920,840,000	910,367,600	98.86
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100%	69,736,000	67,319,600	96.53
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100%	74,574,000	73,100,000	98.02
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100%	776,530,000	769,948,000	99.15
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	100%	162,020,000	136,618,100	84.32

Perumusan kebijakan Teknis dan Pemanapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	162,020,000	136,618,100	84.32
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas asing di Daerah	100%	89,486,000	87,600,300	97.89
Pelaksanaan monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	100%	72,534,000	49,017,800	67.58
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	100%	88,041,000	84,766,500	96.28
Perumusan kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	88,041,000	84,766,500	96.28
Pelaksanaan koordinasi di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	100%	70,056,000	67,090,000	95.77
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100%	17,985,000	17,676,500	98.28
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100%	1,101,510,600	1,012,043,597	91.88
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	1,101,510,600	1,012,043,597	91.88
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	100%	345,240,000	319,895,100	92.66
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	100%	216,660,000	204,791,877	94.52
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	100%	458,190,000	426,771,020	93.14
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	100%	81,420,600	60,585,600	74.41
TOTAL	98,50%	7,740,206,950	7,330,210,844	94.70

ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan, mengacu pada RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 dengan Mewujudkan misi ke V Kepala Daerah yakni Mewujudkan Kehidupan Sosial, Budaya dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif. Dalam mewujudkan misi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan mempunyai sasaran yaitu : Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik Sosial dan Meningkatnya Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama dalam Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan . Dimana untuk mengukur tercapainya sasaran tersebut ada indikator kinerja yang harus dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu :

1. Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan
2. Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 Penduduk)
3. Persentase Ormas dan Parpol yang Aktif

Dalam rangka memenuhi target sasaran Renstra, Strategi yang diambil antara lain:

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Masyarakat
2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
4. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Adapun capaian sasaran dan indikator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Capaian Indikator Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik Sosial					
NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Sasaran Strategis 2:					

Meningkatnya Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama dalam Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan						
2	Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 Penduduk)		47	44	94%	Sangat Tinggi
3	Persentase Ormas dan Parpol yang Aktif	Persentase Ormas yang Aktif	100%	100	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Parpol yang Aktif	100%	100	100%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian					98,50%	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa semua Indikator Kinerja yang diperjanjikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2022, secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar 98,50% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan telah tercapai dan berhasil dilaksanakan dengan capaian rata-rata $\geq 98,50\%$ dengan katagori Sangat Tinggi, dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan capaian rata-rata $\geq 93,50\%$ maka terjadi peningkatan sasaran kinerja sebesar 5 %

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik Sosial				
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

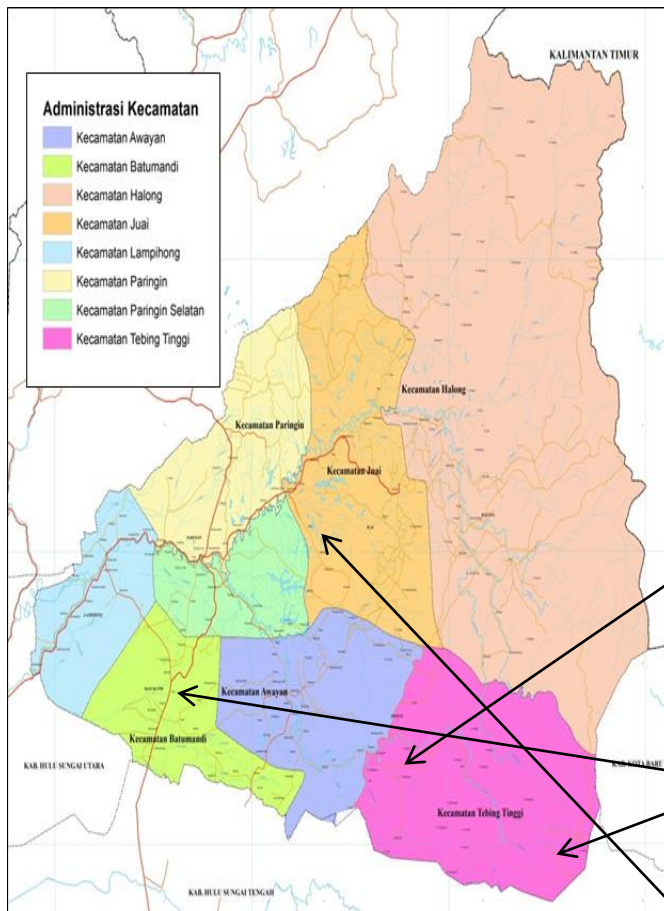
Realisasi capaian kinerja dari indikator “Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan” pada tahun 2022 sebesar 100% dengan kategori **Sangat Tinggi**.

Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan di targetkan 100 %, dimana pada tahun 2022 ini terdapat kejadian yang berpotensi menjadi konflik sosial sebanyak 5 kasus di 8 Kecamatan, Jumlah Daerah Potensi Konflik yang dipetakan sepanjang tahun 2022 sebanyak 8 Daerah potensi konflik dan jumlah Daerah potensi konflik sendiri berjumlah 8 Kecamatan dan 5 Kasus potensi konflik sosial yang terindikasi dapat menyebabkan konflik sosial di masyarakat semuanya sudah ditangani dan tidak menimbulkan konflik.

Adapun capaian tersebut disupport oleh Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial didaerah melalui koordinasi tim terpadu penanganan konflik, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, Forkopimda dan Tim Puskominfo, semua tim tersebut terdiri dari Pemerintah Kabupaten Balangan, Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, BPN, Kemenag, BAIS dan BIN yang yang menghasilkan informasi-informasi terkait potensi konflik didaerah dan melakukan penyelesaian terhadap potensi konflik tersebut.

Dari hasil pemetaan terhadap Daerah Rawan Konflik sebanyak 8 (Delapan) Kecamatan , yang ditargetkan 8 Kecamatan , realisasi keseluruhannya dapat dipetakan, sehingga capaian Indikator kinerja “Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan” tercapai 100%, dengan terdapatnya 5 (lima) potensi konflik yang terdiri dari potensi konflik politik dan potensi konflik sosial budaya seperti yang digambarkan oleh peta dibawah ini:

HASIL PEMETAAN WILAYAH POTENSI KONFLIK KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022



Potensi Konflik Politik/Hukum/Pemerintahan

1. Kasus penyalahgunaan narkoba di Desa Layap Kelurahan Paringin Kota

Potensi Konflik Sosial

1. Kasus banjir rendam Desa Kaladan, Kecamatan Batumandi dan Desa Sei Batung, Kecamatan Juai
2. Kasus Penebangan dan perusakan kebun karet milik warga Desa Auh oleh warga Desa Kambiyain Kecamatan Tebing Tinggi
3. Adanya tambang ilegal di Desa Guha Kecamatan batumandi dan Desa Ju'uh Kecamatan Tebing Tinggi
4. Kasus Permasalahan Sengketa Tanah Yang Terletak di Desa Sungai Batung dan Desa Tawahan , Kecamatan Juai

Nb :

- Kecamatan Tebing Tinggi
- Kecamatan Lampihong
- Kecamatan Halong
- Kecamatan Paringin Selatan
- Kecamatan Aawayan
- Kecamatan Paringin
- Kecamatan Batumandi
- Kecamatan Juai

Perbandingan capaian Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun 2021, dan target ditahun akhir Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Skor Persentase Daerah Rawan Konflik yang terpetakan

2022			2021		Target 2026 (Akhir Renstra)	Capaian terhadap akhir Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian Kinerja Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan di tahun 2022 sama halnya dengan capaian kinerja ditahun 2021 dari hasil pemetaan terhadap Daerah Rawan Konflik sebanyak 8 (Delapan) Kecamatan , yang ditargetkan 8 Kecamatan, realisasi keseluruhannya dapat dipetakan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama dalam Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan				
INDIKATOR		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 Penduduk)		47	44	94%
Persentase Ormas dan Parpol yang Aktif	Persentase Ormas yang Aktif	100%	100%	100%
	Persentase Parpol yang Aktif	100%	100%	100%
RATA- RATA CAPAIAN				98%

1. Rasio Tempat Ibadah

Realisasi capaian kinerja dari indikator “Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 Penduduk)” pada tahun 2022 sebesar 94% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Dimana Rasio tempat ibadah yang ditargetkan pada tahun ini sebanyak 47 tempat ibadah sedangkan realisasinya sebanyak 44 tempat ibadah untuk 10.000 penduduk ditahun 2022 atau sebanyak 579 tempat ibadah berdiri di Kabupaten Balangan.

Capaian kinerja untuk indikator Rasio Tempat Ibadah per 10.000 penduduk dengan realisasi sebesar 44 tempat ibadah per 10.000 jumlah penduduk tidak sesuai dengan target sebesar 47 tempat ibadah dalam 10.000 jumlah penduduk, hal ini terjadi antara lain karena :

➤ Jumlah penduduk menurut penganut agama selain Islam cukup rendah di Kabupaten Balangan yaitu 8.237 jiwa (6,20%) dari jumlah penduduk Kabupaten Balangan yaitu sebesar 132.643 jiwa di Kabupaten Balangan sehingga ketika ingin mendirikan rumah ibadah sering kali terkendala dengan persyaratan administrasi yang harus dilengkapi seperti yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 Pasal 14 yaitu :

1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.
2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.
3. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama Kabupaten/kota.
4. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/kota.

Perbandingan Capaian Rasio Tempat Ibadah tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun 2021, dan target ditahun akhir Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel
Skor Rasio Tempat Ibadah

2022			2021		Target 2026 (Akhir Renstra)	Capaian terhadap akhir Renstra
Target	Realisasi	Capain	Realisasi	Capaian		
47	44	94%	42	93%	60	73%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 93% yaitu 42 tempat ibadah per 10.000 penduduk untuk capaian tahun ini mengalami peningkatan menjadi 94% yaitu 44 tempat ibadah per 10.000 penduduk. Dimana untuk tahun 2021 ada 553 tempat ibadah yang ada, sedangkan untuk tahun 2022 sebanyak 579 tempat ibadah atau sebanyak 26 tempat ibadah baru berdiri selama kurun waktu tahun 2022 di Kabupaten Balangan.

1. Persentase Ormas dan Parpol yang Aktif

a. Persentase Ormas yang Aktif

Capaian kinerja dari dari “Persentase Ormas yang Aktif “ sebesar 100% dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**.

Adapun Ormas yang dimaksud dalam indikator ini adalah Ormas yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri ataupun Kementerian Hukum dan Ham. Ormas di kabupaten Balangan yang terdaftar ataupun diakui oleh Kementerian adalah berjumlah sebanyak 28 Ormas.

Perbandingan capaian Persentase Ormas yang aktif tahun 2022 dengan capaian tahun 2021, dan target ditahun akhir Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Skor Persentase Ormas yang Aktif

2022			2021		Target 2026 (Akhir Renstra)	Capaian terhadap akhir Renstra
Target	Realisasi	Capain	Realisasi	Capaian		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sama halnya sebesar 100% . Dimana untuk tahun 2021 ada Ormas yang aktif di Kabupaten Balangan berjumlah 18 (delapan belas) Ormas dari seluruh Ormas yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dan Kemenkum HAM sebanyak 18 (delapan belas) Ormas, sedangkan untuk tahun 2022 ormas yang aktif di Kabupaten Balangan berjumlah 28 (dua Puluh Delapan) Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Kabupaten Balangan yang terdaftar dan mendapatkan SKT dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini berarti selama kurun waktu satu tahun ada kenaikan 10 ormas dari 18 ormas yang terdaftar di tahun 2021 menjadi 28 Ormas yang telah terdaftar di tahun 2022.

b. Persentase Partai Politik yang Aktif

Capaian Kinerja dari “Persentase Partai Politik yang Aktif” sebesar 100 % dengan Kategori Capaian Sangat Tinggi, Adapun partai politik yang dimaksud dalam indikator ini adalah Partai Politik yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan yang berjumlah sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) Partai Politik dan seluruhnya aktif

Perbandingan Capaian Persentase Parpol yang aktif tahun 2022 dengan capaian tahun 2021 dan target ditahun akhir Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Skor Persentase Parpol yang Aktif

2022			2021		Target 2026 (Akhir Renstra)	Capaian terhadap akhir Renstra
Target	Realisasi	Capain	Realisasi	Capaian		
100%	100%	100%	81%	81%	100%	100%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu mengalami kenaikan dari 81% Parpol yang aktif menjadi 100% Parpol yang aktif di Kabupaten Balangan . Dimana untuk tahun 2021 Parpol yang aktif di Kabupaten Balangan berjumlah 17 (tujuh belas) Parpol dari 21 (dua puluh satu) Parpol yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sedangkan untuk tahun 2022 Parpol yang aktif di Kabupaten Balangan berjumlah 22 (dua puluh dua) Parpol yang aktif dari 22 (dua puluh dua) parpol yang terdaftar di Kabupaten Balangan.

Untuk pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Balangan

No	Indikator	SPM/stand ar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
										Tahun 2022	Tahun 2023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 Penduduk)	-	-	45	47	50	53	55	60	44	50	
3	Persentase Ormas dan Parpol yang Aktif	% Ormas	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		% Parpol			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi yang selalu berkaitan dengan kondisi ketentraman sosial, politik, organisasi kemasyarakatan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan telah melaksanakan koordinasi penanganan konflik sosial, pengumpulan data dan informasi terkait daerah rawan potensi konflik sosial juga melaksanakan pengawasan terhadap daerah rawan potensi konflik sosial atau daerah berpotensi konflik, sosialisasi-sosialisasi wawasan kebangsaan, pelayanan pendaftaran ormas, pelayanan rekomendasi surat keterangan penelitian, pembinaan Organisasi Kemasyarakatan serta penyuluhan tentang pendidikan politik dan etika serta budaya politik bagi parpol dan masyarakat.

Secara garis besar Permasalahan dan hambatan yang dihadapi :

1. Dukungan Persiapan Pelaksanaan Pilkada dan Pemilu serentak Tahun 2024
2. Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Peningkatan Kualitas Demokrasi.
3. Pendidikan Politik dalam rangka membangun pemilih cerdas dan bertanggung jawab
4. Melemahnya pemahaman terkait nilai-nilai Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
5. Pemeliharaan kerukunan umat beragama.
6. Peningkatan kewaspadaan Nasional dan Daerah.
7. Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik
8. Sinkronisasi data ormas berbadan hukum dan ormas tidak berbadan hukum serta ormas asing dalam rangka pengawasan organisasi kemasyarakatan.

9. Penguatan fungsi advokasi sebagai advokasi tren peningkatan permasalahan hukum dibidang keormasan.
10. Antisipasi peningkatan afiliasi politik ormas dan potensi konflik horizontal antara ormas sebagai akses dimulainya tahapan tahun politik.
11. Stabilitas ekonomi, kerukunan sosial dan pemajuan kebudayaan daerah.
12. Rencana Aksi P4GN

2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2024, merupakan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang disusun dan ditetapkan setelah pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih . RKPD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana Kerja SKPD Tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Secara keseluruhan, Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Balangan
Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesbangpol	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah	74,40 84	6,451,595,376	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesbangpol	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah	74,40 84	6,451,595,376	-
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kesbangpol	<i>Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	356,716,900	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kesbangpol	<i>Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	356,716,900	-
01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	269,343,300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	269,343,300	-
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dok	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dok	-	-
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dok	17,531,600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dok	17,531,600	-

01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dok	9,644,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dok	9,644,000	-
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	60,198,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	60,198,000	-
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Kesbangpol	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	3,973,919,076	Administrasi keuangan perangkat daerah	Kesbangpol	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	3,973,919,076	-
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang/bulan	3,848,018,476	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang/bulan	3,848,018,476	-
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,022,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,022,000	-
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	122,878,600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	122,878,600	-
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kesbangpol	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%	201,034,500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kesbangpol	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%	201,034,500	-

05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kesbangpol	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	71,634,500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kesbangpol	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	71,634,500	-
05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	129,400,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	129,400,000	-
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kesbangpol	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	1,179,597,800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kesbangpol	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	1,179,597,800	-
06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kesbangpol	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,785,000	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kesbangpol	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,785,000	-
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	571,858,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	571,858,000	-
06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kesbangpol	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,697,500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kesbangpol	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,697,500	-
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3,300,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3,300,000	-
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	636 Laporan	582,957,300	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	636 Laporan	582,957,300	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kesbangpol	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	831,783,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kesbangpol	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	831,783,000	-

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kesbangpol	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	831,783,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kesbangpol	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	831,783,000	-
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kesbangpol	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100%	380,256,300	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kesbangpol	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100%	380,256,300	-
08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	124,600,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	124,600,000	-
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber daya air dan Listrik	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	137,745,000	Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber daya air dan Listrik	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	137,745,000	-
08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12,790,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12,790,000	-
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	105,121,300	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	105,121,300	-
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kesbangpol	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	360,070,800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kesbangpol	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	360,070,800	-
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kesbangpol	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	285,133,400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kesbangpol	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	285,133,400	-
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kesbangpol	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	74,937,400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kesbangpol	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	74,937,400	-

2	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Balangan	Angka Potensi Konflik Sosial Berlatar Belakang Suku,Ras/Etnis dan antar Golongan yang tertangani	1 Potensi Konflik	5,416,932,700	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Balangan	Angka Potensi Konflik Sosial Berlatar Belakang Suku,Ras/Etnis dan antar Golongan yang tertangani	1 Potensi Konflik	5,416,932,700	-
1	Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Kab. Balangan	Jumlah Forum / Gerakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Aktif	4 Forum	5,416,932,700	Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Kab. Balangan	Jumlah Forum / Gerakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Aktif	4 Forum	5,416,932,700	-
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Balangan	Jumlah Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Dokumen	71,474,800	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Balangan	Jumlah Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Dokumen	71,474,800	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3000 Orang	1,566,235,900	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3000 Orang	1,566,235,900	
1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250 Orang	3,771,096,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250 Orang	3,771,096,000	-
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	8,126,000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	8,126,000	-
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kab. Balangan	Persentase Parpol yang Aktif	100%	33,105,137,440	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kab. Balangan	Persentase Parpol yang Aktif	100%	33,105,137,440	-

8	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik</i>	Kab. Balangan	<i>Jumlah Parpol yang Aktif melaporkan kegiatan</i>	9 Parpol	33,105,137,440	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik</i>	Kab. Balangan	<i>Jumlah Parpol yang Aktif melaporkan kegiatan</i>	9 Parpol	33,105,137,440	-
8	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1300 Orang	265,132,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1300 Orang	265,132,000	-
8	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1500 Orang	31,947,964,840	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1500 Orang	31,947,964,840	-
8	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9 Laporan	892,040,600	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9 Laporan	892,040,600	-

4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	Kab. Balangan	Persentase Ormas yang aktif	100%	718,250,600	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	Kab. Balangan	Persentase Ormas yang aktif	100%	718,250,600	-
8	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Balangan	Jumlah Ormas yang melaporkan Kegiatan Penanganan Potensi Konflik	11 Ormas	718,250,600	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Balangan	Jumlah Ormas yang melaporkan Kegiatan Penanganan Potensi Konflik	11 Ormas	718,250,600	-
8	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas asing di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	540 orang	309,175,600	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas asing di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	540 orang	309,175,600	-
8	Pelaksanaan monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 Laporan	409,075,000	Pelaksanaan monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 Laporan	409,075,000	-
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Kab. Balangan	Angka Potensi Konflik sosial berlatar belakang Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama yang Tertangani	100%	493,599,600	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Kab. Balangan	Angka Potensi Konflik sosial berlatar belakang Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama yang Tertangani	100%	493,599,600	-
8	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Balangan	Jumlah Forum yang aktif melaksanakan Kegiatan Penanganan Konflik	2 Forum	493,599,600	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Balangan	Jumlah Forum yang aktif melaksanakan Kegiatan Penanganan Konflik	2 Forum	493,599,600	-

	Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Dok	22,472,000	Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Dok	22,472,000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	555 Orang	289,718,600	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	555 Orang	289,718,600	
8	Pelaksanaan koordinasi di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	475 Orang	162,863,000	Pelaksanaan koordinasi di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	475 Orang	162,863,000	-
3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	18,546,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	18,546,000	-
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kab. Balangan	Persentase potensi konflik yang terselesaikan	100%	10,230,539,500	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kab. Balangan	Persentase potensi konflik yang terselesaikan	100%	10,230,539,500	-

8	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Balangan	Jumlah Forum Kewaspadaan dan Penanganan Konflik yang Aktif	7 Forum	10,230,539,500	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Balangan	Jumlah Forum Kewaspadaan dan Penanganan Konflik yang Aktif	7 Forum	10,230,539,500	-
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	6 dokumen	119,294,500	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	6 dokumen	119,294,500	-
8	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	122 Orang	1,614,536,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	122 Orang	1,614,536,000	-
8	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	250 Orang	112,886,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	250 Orang	112,886,000	-

8	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6 Laporan	73,550,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6 Laporan	73,550,000	-
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	8,310,273,000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	8,310,273,000	-
					57,247,838,216					57,247,838,216	-

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja ini dapat bersumber dari usulan SKPD, dari masukan unsur Forkopimda , KPU, Bawaslu, Ormas, Parpol, maupun aspirasi dari masyarakat dimana usulan-usulan Program dan Kegiatan tersebut dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan. Adapun usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan pada tahun 2024 ini belum ada usulan terkait penganggaran.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	USULAN PROGRAM / KEGIATAN/ SARAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	KETERANGAN
1	Mendukung semua program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar Kabupaten Balangan dapat mempertahankan kondusifitas daerah untuk kesejahteraan masyarakat Balangan	-	-	-	Saran dari Ketua Pengadilan Negeri Balangan
2	Sosialisasi Pemilu terhadap Pemilih Pemula dikemas dalam bentuk outbond	-	-	-	Ketua Bawaslu kabupaten Balangan
3	Adanya Forum Penyelenggara Pemilu baik Bawaslu, KPU serta jajarannya untuk sinergitas Bersama penyelenggra pemilu dengan melakukan kegiatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan	-	-	-	Ketua Bawaslu kabupaten Balangan
4	Pengadaan Baju lapangan untuk pengawas pemilu	-	-	-	Ketua Bawaslu kabupaten

	yang dianggarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				Balangan
5	Proposal Hibah terhadap Bawaslu agar bisa diakomodir	-	-	-	Ketua Bawaslu kabupaten Balangan
6	Sangat diperlukan Mobil Double Cabin dan Trail untuk menjangkau daerah terpencil sebagai sarana untuk penanganan konflik dan sosialisasi pemilu serta pembinaan ormas	-	-	-	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol
7	Pendanaan terhadap jasa pengamanan TPS dan pakaiannya	-	-	-	Kabid Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja
8	Deteksi dini kemungkinan terjadinya konflik dan turun kemasyarakat sehingga tidak terjadi konflik terutama konflik tapal batas antar kecamatan dan antar desa	-	-	-	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
9	Organisasi Masyarakat ataupun Lembaga adat mohon diperhatikan dengan pemberian insentif ataupun bantuan lainnya karena ormas sangat berpartisipasi dalam kondusifitas Balangan	-	-	-	Dewan Adat Dayak
10	Kegiatan pembinaan ormas harus lebih inovatif	-	-	-	
11	Dukungan anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama dalam melakukan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Desa Sadar Kerukunan dan Desa Moderasi	-	-	-	Forum Kerukunan Umat Beragama
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga harus menganggarkan Sosialisasi karena dana sosialisasi di KPU terbatas dan libatkan KPU dalam pengawasan kegiatan	-	-	-	Ketua KPU Balangan
13	Proposal Hibah KPU dapat diakomodir	-	-	-	Ketua KPU Balangan

14	Selalu pertahankan kondusifitas Balangan, jangan sampai Paringin membara dan saling kerjasama saling jaga untuk Balanga aman dan kondusif	-	-	-	Kabag Ops Polres balangan
15	Jaga masjid dan tempat ibadah yang lainnya agar tidak menjadi tempat kegiatan politik	-	-	-	Kemenag Balangan
16	Pendidikan dini kepaskibraan dilakukan dari Sekolah Menengah Pertama dan diharapkan paskibraka Balangan dapat tembus ke Nasional	-	-	-	PPI
17	Talkshow kesekolah sekolah tentang kepaskibrakaan	-	-	-	PPI

Jika ada usulan, apabila memungkinkan akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan dana yang ada dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan pemerintahan daerah, rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2024, secara umum berpedoman pada sasaran dan tujuan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran ini juga mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam pelaksanaannya desentralisasi penataan daerah ditujukan pada upaya untuk :

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah;
- f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Rumusan tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yaitu:
 1. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Perdesaan dan Perkotaan
 2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
 3. Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
 4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
 5. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif
 6. Meningkatnya nilai Indeks Desa membangun

Sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2024 terkait dengan tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah bertahannya angka konflik sosial yang bernuansa SARA untuk mewujudkan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan Terjaganya kehidupan sosial yang kondusif dengan Indikator tujuan Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2024 merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Balangan. Oleh karena itu, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Kalimantan Selatan 2005–2025, RPJM Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan 2024; RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2024.

3.1.TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN SINERGITAS KEBIJAKAN DAERAH.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan undang-undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Penyusunan RKP Tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan.

Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari

pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” tersebut, mulai dari penghapusan kemiskinan ekstrem hingga pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).

Penekanannya di dalam RKP 2024 adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2024 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan 2024 yaitu “Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” Berdasarkan tema RKPD tersebut

ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing
3. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik
5. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus yang salah satunya Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak pada tahun 2024 menganggarkan dukungan pendanaan kegiatan pilkada serentak sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran yang memadai tahun anggaran 2022-2025 pada organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri. Adapun program dan kegiatan yang dimaksud antara lain:

- 1) Pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat;
- 2) Pembinaan forum kerukunan umat beragama;
- 3) Gerakan kemitraan bersama organisasi kemasyarakatan sipil dan perguruan tinggi mensukseskan pemilu serentak tahun 2024;
- 4) Pembinaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan (FORKOPIMCAM);

- 5) Pembumian nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat mendukung pemilu serentak dan pilkada serentak Tahun 2024;
- 6) Forum komunikasi sosial politik dalam rangka sukses pemilu serentak 2024;
- 7) Pembentukan dan operasionalisasi tim pemantauan, dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan dan tahapan pemilu serentak 2024;
- 8) Penguatan iklan layanan pendidikan politik; dan
- 9) Pembinaan karya seni dan budaya sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mendukung pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah kabupaten tidak dapat terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat. Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Balangan, RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022, permasalahan di Kabupaten Balangan, serta isu-isu strategis, kerangka ekonomi daerah dan pendanaan maka tema pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah “ Peningkatan Infrastruktur, dan Perekonomian Daerah dalam Menunjang Ketahanan Sosial serta Pembangunan Berkelanjutan”.

Berdasarkan tema tersebut, maka dibuat 6 (enam) Prioritas dan Sasaran Pembangunan pada Tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah
2. Pemulihan Ekonomi dalam penanganan dampak pandemi corona virus disease 2019 dan Transformasi Struktural Dalam Perekonomian
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
5. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan
6. Peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan

Hal hal mendasar yang menjadi kebijakan dalam perencanaan pembangunan tahun 2024 mendatang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata, serta ekonomi kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan sesuai dengan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung Misi ke -5 (Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif)

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

a. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1

sampai 5 tahun ke depan. Dengan diformulasikan tujuan strategik ini maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Adapun yang menjadi tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan setelah adanya penyesuaian Rencana Strategis adalah:

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET
1	Meningkatkan Rasa Aman dan Harmonis dalam Hubungan Sosial Kemasyarakatan	Angka Konflik Sosial Bernuansa Sara	0

b. Sasaran

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas.

Adapun yang menjadi sasaran setelah adanya penyesuaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

**Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
1	Meningkatkan Rasa Aman dan Harmonis dalam Hubungan Sosial Kemasyarakatan	Meningkatnya Pemetaan Daerah Potensi Konflik	Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan	100 %
		Meningkatnya Wawasan Politik Masyarakat	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat	12,6%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program tersebut, ada beberapa kriteria yang ditetapkan antara lain:

1. Memperhatikan tugas pokok dari masing-masing bidang
2. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Balangan
3. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang
4. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah serta pencapaian IKU Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang

ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk Tahun 2024 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2024 mencakup 6 Program terdiri dari 12 kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan Rencana anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan program kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. **57.247.838.216,-** (Lima Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah) yang berasal dari APBD.

Rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dijelaskan dalam tabel berikut

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Balangan
Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah	<i>Kesbangpol</i>	74,40 84	6,451,595,376	APBD Kab. Balangan		75,50 85	7,825,834,914
8 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kesbangpol</i>	100%	356,716,900	APBD Kab. Balangan		100%	392,388,590
8 01 01	01 ## 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesbangpol	2 dok	269,343,300	APBD Kab. Balangan		2 dok	296,277,630
8 01 01	01 ## 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kesbangpol	2 dok	-	APBD Kab. Balangan		2 dok	19,284,760
8 01 01	01 ## 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kesbangpol	2 dok	17,531,600	APBD Kab. Balangan		2 dok	-
8 01 01	01 ## 04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kesbangpol	2 dok	9,644,000	APBD Kab. Balangan		2 dok	10,608,400
8 01 01	01 ## 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kesbangpol	2 Laporan	60,198,000	APBD Kab. Balangan		2 Laporan	66,217,800
8 01 01	01 ## <i>Administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik</i>	<i>Kesbangpol</i>	100%	3,973,919,076	APBD Kab. Balangan		100%	4,371,310,984
8 01 01	01 ## 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kesbangpol	19 orang/bulan	3,848,018,476			19 orang/bulan	4,232,820,324

8	01	01	##	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kesbangpol	1 Laporan	3,022,000	APBD Kab. Balangan		1 Laporan	3,324,200
8	01	01	##	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kesbangpol	18 Laporan	122,878,600	APBD Kab. Balangan		18 Laporan	135,166,460
8	01	01	##		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	Kesbangpol	100%	201,034,500	APBD Kab. Balangan		100%	221,137,950
8	01	01	##	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kesbangpol	2 Paket	71,634,500	APBD Kab. Balangan		2 Paket	78,797,950
8	01	01	##	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kesbangpol	15 Orang	129,400,000	APBD Kab. Balangan		15 Orang	142,340,000
8	01	01	##		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	Kesbangpol	100%	1,179,597,800	APBD Kab. Balangan		100%	1,297,557,580
8	01	01	##	01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kesbangpol	1 Paket	10,785,000	APBD Kab. Balangan		1 Paket	11,863,500
8	01	01	##	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kesbangpol	17 Paket	571,858,000	APBD Kab. Balangan		17 Paket	629,043,800
8	01	01	##	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kesbangpol	1 Paket	10,697,500	APBD Kab. Balangan		1 Paket	11,767,250
8	01	01	##	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kesbangpol	1 Dokumen	3,300,000	APBD Kab. Balangan		1 Dokumen	3,630,000
8	01	01	##	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kesbangpol	636 Laporan	582,957,300	APBD Kab. Balangan		636 Laporan	641,253,030
8	01	01	##		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kesbangpol	100%	831,783,000	APBD Kab. Balangan		100%	729,080,000
8	01	01	##	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kesbangpol	6 Unit	831,783,000	APBD Kab. Balangan		6 Unit	729,080,000

8	01	01	##		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	Kesbangpol	100%	380,256,300	APBD Kab. Balangan		100%	418,281,930
8	01	01	##	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kesbangpol	12 Laporan	124,600,000	APBD Kab. Balangan		12 Laporan	137,060,000
8	01	01	##	02	Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kesbangpol	12 Laporan	137,745,000	APBD Kab. Balangan		12 Laporan	151,519,500
8	01	01	##	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kesbangpol	12 Laporan	12,790,000	APBD Kab. Balangan		12 Laporan	14,069,000
8	01	01	##	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kesbangpol	12 Laporan	105,121,300	APBD Kab. Balangan		12 Laporan	115,633,430
8	01	01	##		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	Kesbangpol	100%	360,070,800	APBD Kab. Balangan		100%	396,077,880
8	01	01	##	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kesbangpol	22 Unit	285,133,400	APBD Kab. Balangan		22 Unit	313,646,740
8	01	01	##	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kesbangpol	3 Unit	74,937,400	APBD Kab. Balangan		3 Unit	82,431,140
8	01	02			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Angka Potensi Konflik Sosial Berlatar Belakang Suku,Ras/Etnis dan antar Golongan yang tertangani	Kesbangpol	1 Potensi Konflik	5,416,932,700	APBD Kab. Balangan		1 Potensi Konflik	5,958,625,970
8	01	02	##		Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah Forum / Gerakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Aktif	Kesbangpol	4 Forum	5,416,932,700	APBD Kab. Balangan		4 Forum	5,958,625,970
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	2 Dokumen	71,474,800	APBD Kab. Balangan		2 Dokumen	78,622,280
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	3000 Orang	1,566,235,900	APBD Kab. Balangan		3000 Orang	1,722,859,490

8	01	02	##	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	250 Orang	3,771,096,000	APBD Kab. Balangan	250 Orang	4,148,205,600
8	01	02	##	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		4 Laporan	8,126,000	APBD Kab. Balangan	4 Laporan	8,938,600
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Parpol yang Aktif	Kesbangpol	100%	33,105,137,440	APBD Kab. Balangan	100%	15,509,617,510
8	01	03	201		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik</i>	<i>Jumlah Parpol yang Aktif melaporkan kegiatan</i>	<i>Kesbangpol</i>	<i>9 Parpol</i>	<i>33,105,137,440</i>	<i>APBD Kab. Balangan</i>	<i>9 Parpol</i>	<i>15,509,617,510</i>
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	1300 Orang	265,132,000	APBD Kab. Balangan	1300 Orang	291,645,200

8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	1500 Orang	31,947,964,840	APBD Kab. Balangan	1500 Orang	14,236,727,650
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	9 Laporan	892,040,600	APBD Kab. Balangan	9 Laporan	981,244,660
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	Persentase Ormas yang aktif	Kesbangpol	100%	718,250,600	APBD Kab. Balangan	100%	790,075,660
8	01	04	2.01		Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang melaporkan Kegiatan Penanganan Potensi Konflik	Kesbangpol	11 Ormas	718,250,600	APBD Kab. Balangan	11 Ormas	790,075,660
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol	540 orang	309,175,600	APBD Kab. Balangan	540 orang	340,093,160
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol	3 Laporan	409,075,000	APBD Kab. Balangan	3 Laporan	449,982,500
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Angka Potensi Konflik sosial belatar belakang Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama yang Tertangani	Kesbangpol	100%	493,599,600	APBD Kab. Balangan	100%	542,959,560
8	01	05	2.01		Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Forum yang aktif melaksanakan Kegiatan Penanganan Konflik	Kesbangpol	2 Forum	493,599,600	APBD Kab. Balangan	2 Forum	542,959,560

8	01	05	2.01	02	Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	2 Dok	22,472,000	APBD Kab. Balangan	2 Dok	24,719,200
3	27	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	555 Orang	289,718,600	APBD Kab. Balangan	555 Orang	318,690,460
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan koordinasi di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	475 Orang	162,863,000	APBD Kab. Balangan	475 Orang	179,149,300
3	27	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	4 Laporan	18,546,000	APBD Kab. Balangan	4 Laporan	20,400,600
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik yang terselesaikan	Kesbangpol	100%	10,230,539,500	APBD Kab. Balangan	100%	11,355,190,850
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pematapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Forum Kewaspadaan dan Penanganan Konflik yang Aktif	Kesbangpol	7 Forum	10,230,539,500	APBD Kab. Balangan	7 Forum	11,355,190,850
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		6 dokumen	119,294,500		6 dokumen	131,223,950

8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	122 Orang	1,614,536,000	APBD Kab. Balangan	122 Orang	1,775,989,600
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	250 Orang	112,886,000	APBD Kab. Balangan	250 Orang	225,772,000
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	6 Laporan	73,550,000	APBD Kab. Balangan	6 Laporan	80,905,000
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kesbangpol	1 Dokumen	8,310,273,000	APBD Kab. Balangan	1 Dokumen	9,141,300,300
									57,247,838,216			41,982,304,464

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahun 2024 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi program kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Renja Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Rencana kerja dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2024, Prioritas Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 benar-benar yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Pelaksanaan kegiatan Renja Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang, satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Balangan
Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	<i>Kesbangpol</i>	<i>65,90</i>	5.503.147.176	APBD Kab. Balangan		<i>66,70</i>	6.782.541.894
8	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik</i>	<i>Kesbangpol</i>	<i>100%</i>	245.794.300	APBD Kab. Balangan		<i>100%</i>	270.373.730
8	01	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesbangpol	2 dok	181.512.700	APBD Kab. Balangan		2 dok	199.663.970
8	01	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kesbangpol	2 dok	17.531.600	APBD Kab. Balangan		2 dok	19.284.760
8	01	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kesbangpol	2 dok	7.160.000	APBD Kab. Balangan		2 dok	7.876.000
8	01	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kesbangpol	2 dok	39.590.000	APBD Kab. Balangan		2 dok	43.549.000
8	01	01	202		<i>Administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<i>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</i>	<i>Kesbangpol</i>	<i>100%</i>	3.458.703.076	APBD Kab. Balangan		<i>100%</i>	3.804.573.384

8	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kesbangpol	19orang	3.348.018.476			17 orang	3.682.820.324
8	01	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kesbangpol	1 Laporan	2.670.000	APBD Kab. Balangan		1 Laporan	2.937.000
8	01	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kesbangpol	18 Laporan	108.014.600	APBD Kab. Balangan		18 Laporan	118.816.060
8	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kesbangpol	100%	176.034.500	APBD Kab. Balangan		1	193.637.950
8	01	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kesbangpol	3 Paket	71.634.500	APBD Kab. Balangan		2 Paket	78.797.950
8	01	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kesbangpol	10 Orang	104.400.000	APBD Kab. Balangan		10 Orang	114.840.000
8	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kesbangpol	100%	948.142.300	APBD Kab. Balangan		100%	1.042.956.530
8	01	01	206	01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kesbangpol	1 Paket	10.785.000	APBD Kab. Balangan		1 Paket	11.863.500
8	01	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kesbangpol	4 Paket	342.347.300	APBD Kab. Balangan		1 Paket	376.582.030
8	01	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kesbangpol	1 Paket	10.652.500	APBD Kab. Balangan		1 Paket	11.717.750

8	01	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kesbangpol	1 Dokumen	3.300.000	APBD Kab. Balangan		1 Dokumen	3.630.000
8	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kesbangpol	805 Laporan	581.057.500	APBD Kab. Balangan		1 Laporan	639.163.250
8	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diadakan	Kesbangpol	3 unit	-	APBD Kab. Balangan			729.080.000
8	01	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kesbangpol	3 Unit	-	APBD Kab. Balangan			729.080.000
8	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kesbangpol	12 Bulan	346.913.000	APBD Kab. Balangan		12 Bulan	381.604.300
8	01	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kesbangpol	12 Laporan	124.600.000	APBD Kab. Balangan		1 Laporan	137.060.000
8	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kesbangpol	12 Laporan	113.248.000	APBD Kab. Balangan		1 Laporan	124.572.800
8	01	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kesbangpol	12 Laporan	12.790.000	APBD Kab. Balangan		1 Laporan	14.069.000
8	01	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kesbangpol	12 Laporan	96.275.000	APBD Kab. Balangan		1 Laporan	105.902.500
8	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kesbangpol	12 Bulan	327.560.000	APBD Kab. Balangan		12 Bulan	360.316.000
8	01	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kesbangpol	22 Unit	264.159.700	APBD Kab. Balangan		24 Unit	290.575.670

8	01	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kesbangpol	2 Unit	63.400.300	APBD Kab. Balangan	2 Unit	69.740.330
8	01	02			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakat	Kesbangpol	100%	5.110.146.300	APBD Kab. Balangan	100%	5.621.160.930
8	01	02	201		<i>Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</i>	<i>Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Kesbangpol</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>5.110.146.300</i>	<i>APBD Kab. Balangan</i>	<i>100%</i>	<i>5.621.160.930</i>
8	01	02	201	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	2 Dokumen	21.482.000	APBD Kab. Balangan	2 Dokumen	23.630.200
8	01	02	201	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	38 Orang (unsur)	1.459.442.300	APBD Kab. Balangan	38 Orang (unsur)	1.605.386.530
8	01	02	201	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	42 Orang (unsur)	3.621.096.000	APBD Kab. Balangan	16 Orang (unsur)	3.983.205.600
8	01	02	201	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		3 Laporan	8.126.000	APBD Kab. Balangan	1 Laporan	8.938.600

8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	100%	48.460.514.300	APBD Kab. Balangan	100%	15.279.875.690
8	01	03	201		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik</i>	<i>Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	Kesbangpol	1 Dokumen	48.460.514.300	APBD Kab. Balangan	100%	15.279.875.690
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	1600 Orang	165.528.800	APBD Kab. Balangan	100 Orang	182.081.680
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	142 Orang	47.512.197.900	APBD Kab. Balangan	20 Orang	14.236.727.650

8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	9 Laporan	782.787.600	APBD Kab. Balangan	9 Laporan	861.066.360
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	Persentase Ormas yang aktif	Kesbangpol	100%	222.020.600	APBD Kab. Balangan	100%	244.222.660
8	01	04	2.01		Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kesbangpol	1 Dokumen	222.020.600	APBD Kab. Balangan	100%	244.222.660
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol	240 orang	80.455.600	APBD Kab. Balangan	60 Orang (unsur)	88.501.160
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol	3 Laporan	141.565.000	APBD Kab. Balangan	1 Laporan	155.721.500
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Ormas Keagamaan yang Aktif	Kesbangpol	100%	276.491.000	APBD Kab. Balangan	100%	304.140.100
8	01	05	2.01		Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol	2 Dokumen	276.491.000	APBD Kab. Balangan	100%	304.140.100

					<i>Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	1 Dok	22.472.000	APBD Kab. Balangan	1 Dok	24.719.200
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	34 orang (unsur)	72.610.000	APBD Kab. Balangan	34 orang (unsur)	79.871.000
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan koordinasi di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	43 Orang (unsur)	162.863.000	APBD Kab. Balangan	55 Orang (unsur)	179.149.300
3	27	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	2 Laporan	18.546.000	APBD Kab. Balangan	1 Laporan	20.400.600
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	Kesbangpol	100%	1.239.288.000	APBD Kab. Balangan	100%	1.497.844.200
8	01	06	2.01		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Kesbangpol</i>	1 Dokumen	1.239.288.000	<i>APBD Kab. Balangan</i>	1 Dokumen	1.497.844.200

8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		6 dokumen	121.626.000			6 dokumen	133.788.600
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	32 Orang (unsur)	724.896.000	APBD Kab. Balangan		32 Orang (unsur)	797.385.600
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	200 orang (unsur)	149.586.000	APBD Kab. Balangan		200 orang (unsur)	299.172.000
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	6 Laporan	98.440.000	APBD Kab. Balangan		6 Laporan	108.284.000
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kesbangpol	1 Dokumen	144.740.000	APBD Kab. Balangan		1 Dokumen	159.214.000
									60.811.607.376				29.729.785.474

4.2 Analisis Sosial Ekonomi

Dalam dokumen perencanaan RENSTRA, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan memiliki tujuan “Terwujudnya Kerukunan dan Toleransi dalam Masyarakat dengan sasaran “Meningkatnya Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama dalam Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik “ dimana di dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki Program yang dapat mendorong pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Program tersebut adalah:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Masyarakat

Pelaksanaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan merupakan suatu proses pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Penguatan ideologi ini apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan beberapa dampak terutama dalam hal sosial ekonomi di masyarakat dimana kita ketahui bahwa masyarakat kita terdiri dari berbagai macam suku, dimana untuk kehidupan social ekonomi otomatis mempunyai keragaman yang sangat banyak.

Prinsip ekonomi yang dikembangkan oleh Pemerintah daerah hendaknya berlandaskan Pancasila terutama sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dimana dalam sosial ekonomi dimasyarakat kita harus memperhatikan aspek-aspek social dimasyarakat terutama dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pun harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan Politik dan pengembangan Etika Budaya Politik memiliki manfaat secara sosial ekonomi diantaranya :

- a. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan Politik dalam hal Pendidikan Politik bagi Masyarakat yang baik akan meningkatkan kestabilan ekonomi di Masyarakat.
- b. Pengembangan Etika Budaya Politik yang baik akan berdampak kepada kebijakan Politik di suatu negara atau wilayah akan dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan, bisnis dan perekonomian negara atau wilayah tersebut.

3. Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan memiliki manfaat secara sosial ekonomi diantaranya :

- a. Peningkatan Pemberdayaan yang baik kepada Organisasi Kemasyarakatan mampu menekan perekonomian yang cenderung kurang stabil.
- b. Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang baik dapat meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat bersaing di Masyarakat.

4. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama merupakan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dimasyarakat. Pelaksanaan pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama memiliki manfaat secara sosial ekonomi diantaranya :

- a. Ketahanan Ekonomi yang baik akan meningkatkan kestabilan ekonomi di masyarakat dimana animo masyarakat dalam hal transaksi jual beli akan terus meningkat.
- b. Ketahanan Sosial akan berpengaruh terhadap ekonomi apabila tidak dikelola dengan baik, masalah-masalah sosial yang ada dimasyarakat

untuk saat ini yang sangat mengkhawatirkan adalah masalah peredaran narkoba yang terus meningkat, apabila hal ini tidak ditangani dengan baik akan berdampak terhadap sosial ekonomi dimasyarakat tidak hanya untuk keluarga yang terlibat dalam masalah narkoba juga untuk lingkungan disekitarnya karena kejahatan juga pasti akan meningkat.

- c. Ketahanan Budaya sangat berpengaruh terhadap social ekonomi di masyarakat, dimana banyak tempat-tempat cagar budaya yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat jika dikelola dengan baik untuk menjadi objek wisata, selain itu juga budaya yang menjadi kearifan local suatu daerah sangat penting untuk terus dilestarikan.
- d. Ketahanan Agama merupakan unsur penting dalam pembangunan suatu daerah, dimana beragamnya agama yang ada disuatu daerah perlu terus untuk dijaga kerukunannya agar berpengaruh baik terhadap sosial ekonomi yang ada dimasyarakat.

5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Dengan peningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap konflik sosial serta Fasilitasi terhadap penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Balangan diharapkan Pemerintah Kabupaten Balangan dapat menjadi Daerah yang Damai dan Kondusif antar masyarakat dalam menjalankan aktifitas sosial kemasyarakatan sehingga nyaman Untuk di tinggali serta dapat menarik tamu/wisatawan dari Daerah lain untuk berkunjung dan menetap. Serta perekonomian masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Balangan dapat tumbuh dan berkembang, sehingga investasi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat.

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024 ini merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Balangan secara keseluruhan. Rincian daftar program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 diupayakan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta tepat waktu.

Rencana Kerja ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang sesuai dengan tugas, pokok, fungsi masing-masing, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negative dalam operasional organisasi.

Selain *input* yang baik, hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah kualitas pelaksanaan kegiatan. *Input* dan *proses* akan memberikan *benefit* dan *impact* kepada *output* maupun *outcome*, baik secara langsung maupun tidak langsung, Oleh karena itu semua pihak terkait, khususnya jajaran aparat yang ada didalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu mencermati berbagai rambu dan petunjuk di dalam melaksanakan tugas serta mengemban tanggung jawabnya. Pelaksanaan tugas harus fokus pada upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang secara tidak langsung juga akan berdampak pada pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yaitu Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju dan Sejahtera.

Paringin, Juli 2023

Kepala Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Balangan



H. SYAIFUDDIN TAILAH, S.Pd. MM

Pembina Tk. I / IVb

NIP. 19670403 199403 1 015